

HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM



Drs. H. Abdul Wahid, SH., M.Ag.
Dr. Basori Mochsin, Msi.
Mariyadi, SH., MH.
H. Anang Sulistyono, SH., MH.
H. Moh. Muhibbin, SH., MH.
Sunardi, SH., MH.
Mirin Primudiasuti, SH., MH.
Ana Rahmatu Sa'dyah, SH., MH.
Nur Aini Rachmawati, SH., MH.



HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM

Drs.H. Abdul wahid, SH.M.Ag.

Dr. Basori Mochsin, Msi

Mariyadi, SH., MH.

H.Anang Sulistyono, SH.MH.

H. Moh. Muhibbin, SH.MH.

Drs.H. Abdul wahid, SH.MAg.

Sunardi, SH.MH.

Mirin Primudiasuti, SH.MH.

Ana RahmatusSa'dyah, SH.MH.

Nur Aini Rachmawati, SH.MH.

Program Hibah Kompetisi A2 Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Unisma Bekerjasama dengan Proyek Peningkatan
Manajemen Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional 2007

Diterbitkan:

VISIPRESS MEDIA

Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wahid, Abdul,

HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM / Penulis,
Drs. H. Abdul Wahid, SH., M.Ag., et al, Cetakan I, Surabaya
: Visipress Media, 2007
vi, 210 hlm. ; 19 cm

ISBN 978-979-765-015-5

1. Hukum dan HAM

I. Judul

297.15

HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA HUKUM

Penulis

Drs. H. Abdul Wahid, SH.M.Ag., et al.

Layout Isi

Anita Fauziah

Design Cover

Em Irul HD

Cetakan Pertama

Desember 2007

*Hak Cipta dilindungi undang-undang
all rights reserved*

ISBN 978-979-765-015-5

Diterbitkan:

VISIPRESS MEDIA

Surabaya Jl. Kol Sugiono 39 Waru Surabaya Jatim

Malang Jl. Kumis Kucing 42-A Malang

e-mail visipress@plasa.com

Kata Pengantar

Dalam Deklarasi HAM sudah digariskan mengenai hak hidup menjadi hak utama yang harus diperhatikan oleh masyarakat di muka bumi ini. Pelanggaran terhadap hak hidup berarti pelanggaran yang dikutuk oleh masyarakat keseluruhan di muka bumi. Konsumen di bidang penerbangan yang seharusnya mendapatkan perlindungan, akhirnya menjadi korbannya.

Hal itu sejalan pula dengan Memorandum OKI tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Islam (*Masyru'u Watsiqoti Huquq wa-wajibaat al-Insan: Al-Insaniyat al-asasiyat fil-Islam*) butir keduapuluh, bahwa setiap individu dilarang menyalakan hak kehidupan, kebebasan, hidup terhormat, dan keselamatan pribadinya baik secara material maupun normatifnya, ia dilarang pula membelenggu dan memperbudak manusia dimana saja. Persoalannya, sudahkah manusia melindungi hak hidup manusia?

Hal itulah antara lain yang mendorong salah seorang penulis buku ini untuk secepatnya membukukan naskah buku ini, sehingga berjudul "HAM di negara Hukum", yang tentu saja buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap perlindungan atau penegakan HAM di Indonesia.

.Kepada semua teman-teman yang mendukung terbitnya buku ini disampaikan banyak terima kasih, semoga diberi imbalan Allah SWT.

Malang, Nopember 2007

Drs. Abdul Wahid, SH. dkk

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Pedofil dan HAM	1
2. Hak Orang Gila dan Gilanya Kita	7
3. Hakim Menjarah Hak Daerah	13
4. Birokrat Butuh Pendidikan Manajemen Bencana	18
5. Bencana Alam dan Penegakan HAM	23
6. Birokrat Sebagai Pelanggar HAM	28
7. Di Sekolah, Ada Drakula	33
8. Amnesia Dalam Memperjuangkan HAM..	37
9. Pendidikan Nasional, Benarkah Peduli HAM	41
10. Sipilisasi TNI, HAM, dan Demokrasi Komando	47
11. Reformis Dikalahkan Koalisi Kejahatan..	51
12. Sakralisasi " <i>Equality Before The Law</i> "	55
13. Refungsionalisasi Dinas Infokom	59
14. Berjuang Menjaga NKRI	65
15. HAM dan Homo Homini Lupus	70
16. <i>Trafficking</i> Sebagai Pelanggaran HAM ...	74
17. Busung Lapar, Negara Lembek, dan HAM.	82
18. DPRD, Demokrasi, dan <i>Clean Government</i>	88

19. Dehumanisasi Kekayaan Laut dan <i>Illegal Fishing</i>	100
20. Kebocoran Anggaran Sebagai Pelanggaran HAM	105
21. Perdagangan Bayi Sebagai Pelanggaran HAM	110
22. Audit Bantuan Kemanusiaan dan Hukuman Mati	113
23. Perlindungan TKI	126
24. Terorisme dan Hak Asasi Manusia	137
25. Perspektif HAM Di Negara Demokratis.	155
26. Anatomi Korupsi Pajak	170
27. Perempuan Masih Obyek Perbudakan (<i>Perspektif Hak Asasi Manusia</i>).....	184
28. Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah	194
Bahan Bacaan	205

1. PEDOFIL DAN HAM

Kata JE Sahetapy "benarkah bangsa kita ini masih pantas disebut sebagai bangsa beradab, padahal di tengah masyarakat tidak sulit ditemukan perilaku barbar, keji, sangat biadab, dan *homo homini lupus*"? (Fanny Tanuwijaya, dkk)

Memang benarlah kata pakar di Komisi Hukum Nasional tersebut, bahwa potret bangsa Indonesia sedang bopeng, marak kebiadaban, dan berlumuran darah dimana-mana, karena di tengah masyarakat sarat oleh praktik-praktik penodaan kedamaian, keberlanjutan, dan ketenangan hidup. Hak ketenangan dan kedamaian gampang dirampas oleh manusia yang suka berbuat tidak bermoral, keji, dan biadab layaknya binatang. Perilaku layaknya serigala ganas mudah kita jumpai di tengah pergaulan hidup bermasyarakat dan berpolitik.

Kebiadaban, kekejian, atau kebinatangan atas nama pemuasan seksual tampil layaknya serigala buas yang ganas menerkam mangsanya. Birahi seksual menjadi kekuatan yang biologis yang meledak-ledak yang diposisikan sebagai hajat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku atau pemujanya tanpa mengindahkan rambu-rambu moral, agama, dan hukum.

Anak-anak dan perempuan dibawah umur dijadikan sebagai obyek pelanggaran atau pemuas nafsu kebinatangan yang dipuja-puja oleh pelakunya. Mereka dijerumuskan sebagai obyek yang tidak berdaya, yang secara berlapis-lapis diperdayainya hingga rapuh atau